

Gerakan Penolakan Warga Terhadap Kepala Desa Eks-Narapidana

Harijanti Puspa Dewi*

Abstrak

Tulisan ini mengulas proses terbentuknya Aliansi Penyelamat Desa sebagai gerakan sosial yang ada di Desa Dukusari. Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu adanya pungutan liar yang dilakukan kepala desa terhadap program sertifikat tanah gratis yang diadakan oleh pemerintah pusat atau lebih dikenal dengan Program Operasi Nasional Agraria (Prona). Hadirnya Aliansi Penyelamat Desa guna menolak pengaktifan kembali kepala desa Eks-narapidana dan percepatan Pilkades 2018. Fokus permasalahan dari penelitian ini yaitu proses terbentuknya gerakan, strategi gerakan, dan motif gerakan aliansi penyelamat desa. Penelitian ini menggunakan Teori Mobilisasi Sumber Daya dengan metode penelitian kualitatif. Temuan dari penelitian ini yaitu proses terbentuknya gerakan dipengaruhi oleh beberapa factor seperti pungli Prona, status hukum dan kepemimpinan kepala desa, serta peran BPD. Beberapa factor tersebut memicu munculnya gerakan penolakan, bersamaan dengan itu terdapat proses mobilisasi yang dilakukan oleh Aliansi Penyelamat Desa. Strategi yang digunakan oleh aliansi yakni adanya rapat rutin, pembagian tugas, serta adanya sumberdaya untuk melakukan mobilisasi. Terdapat motif mengganti kekuasaan dibalik gerakan aliansi penyelamat desa.

Kata Kunci: Gerakan Sosial, Prona, Kepala Desa Eks-Narapidana, Mobilisasi, Aliansi Penyelamat Desa.

Abstract

This paper reviews about the process of forming the “Aliansi Penyelamat Desa” as a social movement in the village of Dukusari. The problem behind this research is the existence of liability levies committed against programs designated by the central government or better known as the National Agrarian Operations Program (Prona). The presence of the “Aliansi Penyelamat Desa” was to reject the reactivation of the Ex-Prisoner Village Chief and the acceleration of the Pilkades 2018. The focus of this research is the process of formation, strategy and motives of the “Aliansi Penyelamat Desa” movement. This study uses the Resource Mobilization Theory with qualitative research methods. The findings of this study are the process of forming the movement by several factors such as prona extortion, legal status and leadership of the village head, and the role of the BPD. These several factors are cause emergence the movement, and there is a mobilization process carried out by the Aliansi Penyelamat Desa at the same time. The strategies used by alliances are regular meetings, division of tasks, and also the existence resources to mobilize. There is a motive replace the power behind the village rescue alliance movement.

Keywords: Social Movement, Prona, Ex-Prisoner Village Head, Mobilization, Aliansi Penyelamat Desa

Pendahuluan

* Harijanti Puspa Dewi adalah mahasiswa jurusan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya

Masyarakat desa saat ini terus mengalami perkembangan dalam hal cara berpikir. Saat dulu masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang patuh terhadap pemimpinnya. Masyarakat Jawa juga erat kaitannya dengan budaya adiluhung yang terkenal dengan sopan, santun, bertutur kata yang baik dan memahami kekuasaan diperoleh dari Sang Mahakuasa (Hudaya & Nugroho, 2013). Sekarang masyarakat desa lebih berpikir secara rasional, dimana memperhitungkan untung dan rugi dalam menentukan siapa pemimpinnya kelak. Cara kepemimpinan yang baik juga menjadi tolak ukur masyarakat dalam memilih pemimpin. Seringkali pemimpin saat ini lalai dalam mengemban tugasnya dan justru menyalahgunakan kekuasaannya. Banyak sekali pemimpin yang terjatuh berbagai kasus seperti korupsi, narkoba, dan sebagainya. Hal inilah yang menjadikan masyarakat geram terhadap perilaku pemimpinnya, yang mana menimbulkan muncul sebuah protes atau gerakan.

Kasus-kasus yang menjerat kepala desa umumnya berakhir dijeruji besi seperti yang terjadi di beberapa daerah. Kepala Desa Wetan Jepara terjatuh kasus penyelewengan dana bantuan langsung tunai yang berakhir didalam jeruji besi. Masyarakat Desa Wetan menggelar aksi menuntut pengunduran kepala desa dari kursi jabatannya (Liputan 6.com 27 Juli 2009). Kepala Desa Sedapur Gresik didemo oleh warganya sendiri terkait kasusnya yang melakukan penipuan CPNS. Warga sudah tidak lagi percaya dan tidak ingin dipimpin oleh kepala desa bekas mantan narapidana (Surabaya Pagi, 9 September 2011). Terdapat pula di Desa Padike Madura yang masyarakatnya menolak dipimpin kepala desa mantan narapidana atas kasus penggunaan narkoba yang dilakukan oleh kepala desa (Media Madura, 6 Januari 2017).

Gerakan sosial yang terjadi di masyarakat juga terjadi Desa Dukuhsari, Kecamatan Jabon, Sidoarjo. Hal ini terkait dengan kepala desa yang melakukan pungutan liar pada Program Operasi Nasional Agraria (Prona). Warga menolak pengaktifan kembali kepala desa mantan narapidana karena sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada kepala desa tersebut. Kepala desa yang seharusnya menjadi contoh yang baik justru melakukan tindakan yang buruk. Akhirnya warga yang tidak senang membuat aliansi yang bernama aliansi penyelamat desa untuk memperbaiki pemerintahan desa. Mereka melakukan aksi demonstrasi didepan kantor kecamatan Jabon dengan membawa spanduk dan banner yang berisikan tuntutan mereka. (Faktual news.co, 8 Februari 2018).

Penelitian yang meneliti mengenai gerakan sosial dengan memobilisasi sumber daya sudah banyak dilakukan. Penelitian kepada warga desa Lakardowo yang memperjuangkan penutupan industri limbah ilegal yang mencemari lingkungan hidup dengan melakukan gerakan dan memanfaatkan sumber daya untuk melakukan mobilisasi (Sari, 2017). Penelitian selanjutnya masyarakat yang melakukan gerakan untuk menolak pembangunan hotel di atas sumber mata air dengan melakukan upaya jalur hukum dan jalur non-hukum (Mahrid, 2016). Penelitian lainnya yakni masyarakat Kecamatan Sekaran yang melakukan gerakan penolakan akibat adanya polusi yang dihasilkan oleh pembakaran timah pabrik. Gerakan ini memanfaatkan sumberdaya untuk memobilisasi warga lainnya untuk tergabung dalam gerakan dan menekan pemerintah agar mengatasi masalah polusi asap timah (Cahyo R.A. 2015). Selanjutnya penelitian kepada masyarakat Samin yang menolak rencana pembangunan pabrik semen di Sukolilo, Pati. Karena dirasa akan merusak lingkungan tempat tinggalnya (Darmastuti, 2015). Lalu penelitian mengenai masyarakat Bali yang melakukan gerakan penolakan terhadap kegiatan reklamasi Teluk Bena. Perlawanan yang dilakukan ini menggunakan strategi mobilisasi sumber daya seperti pemimpin pengikut, aset keuangan, dan sebagainya (Vali, 2017).

Pembeda antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya adalah gerakan penolakan yang terjadi di Desa Dukuhsari dilakukan oleh warga asli Desa Dukuhsari itu sendiri. Warga desa tidak mungkin melakukan gerakan penolakan tanpa adanya dorongan dari pihak-pihak kuat disekitarnya. Gerakan Aliansi Penyelamat Desa ini terbentuk karena adanya dorongan dari salah satu warga yang ditakuti di Desa Dukuhsari yakni ketua preman. Ketua Preman ini juga didukung oleh salah satu mantan calon kepala desa yang kalah pada Pilkades 2013. Pihak-pihak kuat inilah yang mendorong terbentuknya gerakan penolakan yang dilakukan warga Desa Dukuhsari kepada kepala desa eks-narapidana.

Gerakan sosial kebanyakan terjadi karena adanya rasa kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap sesuatu. Maka muncullah aksi melawan sesuatu hal yang dianggap merugikan banyak orang. Kenyataannya gerakan sosial yang terjadi masih menggunakan nilai-nilai tradisional untuk melawan dominasi dari suatu pemerintahan (Prasisko, 2016 : hal 16). Berkaitan dengan hal tersebut gerakan penolakan yang terjadi di Desa Dukuhsari kecamatan Jabon berkaitan dengan pungutan liar yang dilakukan kepala desa terhadap Program Operasi Nasional Agraria (Prona). Prona merupakan pelayanan pendaftaran tanah yang sederhana, mudah, cepat dan murah yang

diperuntukkan untuk penerbitan setipikat atau bukti hak atas tanah. Prona awalnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional lalu berkembang lagi menjadi Kementrian Agraria dan Tata ruang yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2015 dan terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 2015 tentang Prona. Tujuan dari adanya Prona ini diperuntukkan untuk golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah (Kementrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, 2018).

Kepala desa yang melakukan pungutan liar terhadap warganya dengan berdalih untuk memperlancar proses kepengurusan setifikat tanah. Adanya pungli yang dilakukan kepala desa menjadikannya masuk kedalam penjara dengan kurungan 1 tahun dan denda 50 juta rupiah. Kepala desa diberhentikan sementara dari kursi kepemimpinannya. Saat kepala desa dibebaskan, warga menolak pengaktifan kembali kepala desa, karena tidak ingin dipimpin oleh mantan narapidana. Akhirnya warga membuat aliansi penyelamat desa untuk memperkuat aksinya dalam melawan pengaktifan kepala desa.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yakni (1) Bagaimana proses terbentuknya gerakan penolakan warga terhadap kepala desa eks-narapidana? (2) Apa strategi gerakan penolakan warga terhadap kepala desa eks-narapidana di desa dukuhsari? (3) Apa motif gerakan penolakan terhadap kepala desa eks-narapidana di desa dukuhsari?

Teori Mobilisasi Sumber Daya

Peneliti melihat permasalahan penelitian dengan menggunakan Teori Mobilisasi Sumber Daya. Bert Klandermans merupakan salah satu dari sekian banyak ilmuwan yang mengutarakan tentang Teori Mobilisasi Sumber Daya. Bert Klandermans menjelaskan mengenai Teori Mobilisasi Sumber Daya yang lebih menekankan pada factor-faktor structural yakni adanya sumberdaya yang diberikan untuk individu atau kelompok pada suatu jaringan sosial seperti menjanjikan atau memberikan pekerjaan, keuangan, perlindungan, jabatan dan sebagainya. Bert Klandermans juga menekankan pada rasionalitas seseorang dalam berpartisipasi. Berpartisipasi disini berkaitan dengan memperhitungkan untung dan rugi dalam mengikuti suatu gerakan sosial. Bert Klandermans beranggapan bahwa seseorang yang mengikuti suatu gerakan didasarkan pada

keuntungan yang didapatkan dan sebisa mungkin menjauhkan diri dari kerugian. Seseorang yang berpartisipasi dalam suatu gerakan tentunya sudah memperhitungkan keuntungan apa saja yang akan diperolehnya saat mengikuti serentetan aksi atau gerakan yang dilakukan. Dalam memobilisasi seseorang untuk berpartisipasi dalam gerakan diawali dengan menargetkan simpatisan, merekrut relawan, mengaktifkan jaringan dan memotivasi seseorang untuk berpartisipasi (Klandermans dalam Sukmana 2016 : hal 155).

Kemunculan Gerakan Aliansi Penyelamat Desa

Gerakan aliansi penyelamat desa tidak muncul begitu saja. Berbagai macam factor memicu munculnya gerakan tersebut. Diawali dengan adanya pungutan liar Program Operasi Nasional Agraria (Prona). Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 2015 tentang Prona pada pasal 12 yang disebutkan bahwa pembiayaan Prona berasal dari APBN dan juga berasal dari Pemerintah daerah lewat APBD. Dapat dikatakan bahwa program sertifikat tanah ini gratis, yang mana diperuntukkan bagi masyarakat dengan ekonomi lemah. Tidak boleh ada penarikan apapun yang diberikan kepada seseorang kecuali pembelian alat patok saja. Namun yang terjadi di Desa Dukuhsari sebagai salah satu desa penerima program ini justru berbeda, dimana terdapat pungutan liar yang dilakukan oleh kepala desa. Besaran pungutan liar yang dilakukan berkisar 400 ribu sampai yang paling besar 2 juta rupiah. Pungutan liar yang dilakukan kepala desa lantas membawanya kedalam jeruji besi. Hukuman penjara dan denda yang diberikan kepada kepala desa selama 1 tahun dan denda sebesar lima puluh juta rupiah. Penahanan kepala desa lantas menjadikan jabatannya diberhentikan sementara. Akhirnya kursi kepemimpinan desa kosong dalam beberapa saat.

Status pemberhentian sementara lantas menjadikan kursi kepemimpinannya digantikan oleh pelaksana harian (Plh). Pihak kecamatan menunjuk sekretaris desa menjadi pelaksana harian Desa Dukuhsari. Selang beberapa tahun, sekretaris desa tetap merangkap jabatan sebagai pelaksana harian. Hal ini dikarenakan bupati Sidoarjo belum menunjuk penanggung jawab (PJ) tetap untuk menggantikan kepala desa. Seharusnya setiap enam bulan sekali harus ada pembaruan pns yang menjadi pelaksana harian, namun hal ini tidak terjadi di Desa Dukuhsari. Ketika telah ada PJ yang ditetapkan maka biasa diadakan pemilihan kepala desa (pilkades) di Desa Dukuhsari. Faktor pemicu lainnya yakni kepemimpinan kepala desa yang dianggap arogan

oleh beberapa warganya. Kepemimpinan kepala desa dirasa sangat keras terhadap warganya, segala perintahnya harus dilaksanakan. Ditambah lagi dengan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dianggap lalai dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. BPD bahkan mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa kepala desa telah melakukan pungutan liar terhadap warganya. Kurangnya fungsi pengawasan ini memungkinkan timbulnya pungutan liar di Desa Dukuhsari.

Factor – factor munculnya gerakan aliansi ini merupakan alasan kekecewaan yang dirasakan oleh warga. Macionis mengungkapkan bahwa tahapan proses munculnya gerakan salah satunya karena ada pandangan bahwa segala sesuatunya sedang berjalan tidak baik (Macionis 1999 dalam Sukmana 2016 : hal 26). Warga yang merasa kecewa atas perbuatan yang dilakukan kepala desa, akhirnya berusaha membuat aliansi penyelamat desa. Pencetus berdirinya aliansi ini berasal dari warga asli Desa Dukuhsari, yang mana ditakuti di desa dan juga yang paling keras menolak adanya korupsi di Desa Dukuhsari beliau adalah ketua preman di Desa Dukuhsari. Aliansi ini dibentuk sebagai tempat untuk menampung keluhan-keluhan yang dirasakan warga Desa Dukuhsari. Aliansi penyelamat desa terbentuk sejak Desember tahun 2017. Untuk mendapatkan anggota yang akan tergabung dalam aliansi penyelamat ini, tentunya melalui beberapa proses mobilisasi seperti yang diungkapkan oleh Bert Klandermans. Memobilisasi seseorang agar tergabung dengan aliansi diawali dengan menargetkan simpatisan, merekrut relawan, mengaktifkan jaringan, dan memotivasi untuk berpartisipasi (Klandermans 2005 : hal 104-123).

Tahap pertama yang dilakukan oleh aliansi adalah menargetkan simpatisan dimana hal ini berkaitan dengan jaringan yang telah ada pada aliansi ini. Target yang ditentukan oleh aliansi adalah karang taruna dari setiap RT, teman dan saudara mereka. Target ini sebagai sasaran agar memperoleh dukungan dari warga. Tahap kedua aliansi telah merekrut relawan untuk mendapatkan dukungan yang siap membantu usahanya sampai selesai. Terbukti aliansi mendapatkan dukungan dari warga yang bersedia menjadi korlap aksi dan bergabungnya teman serta saudara dari anggota aliansi. Tahap ketiga mengaktifkan jaringan yakni berkaitan dengan mendapatkan lebih banyak dukungan dari orang-orang yang berpotensi melancarkan aksinya. Salah satunya mendapatkan dukungan dari kawan yang bekerja disalah satu media di Sidoarjo. Tahap terakhir aliansi memotivasi seseorang untuk berpartisipasi dengan mengatakan bahwa

aliansi ini dibentuk untuk menciptakan pemerintahan desa yang bersih dari korupsi, serta untuk menampung keluhan dari setiap warga. Meski begitu bergabung dengan aliansi ini bersifat sukarela dan tidak memaksa jadi diperbolehkan untuk bergabung atau tidak. Hasilnya aliansi hanya mendapat sedikit tambahan anggota yang berasal dari teman atau saudara, tidak dengan karang taruna dari setiap RT. Meski sedikit aliansi dapat menjalankan aksinya pada Februari 2018 didepan kantor Kecamatan Jabon.

Taktik Gerakan Aliansi Penyelamat Desa

Taktik atau strategi diperlukan untuk dapat memuluskan jalannya aksi didepan kantor kecamatan Jabon. Aliansi menyusun rangkaian kegiatannya dalam sebuah rapat anggota yang dilakukannya. Saat rapat perdana berlangsung diikuti oleh sepuluh orang anggota aliansi. Aliansi melakukan rapat untuk membahas mengenai aksi yang akan dilakukan, selama rapat berlangsung anggota diperbolehkan memberikan ide atau masukan untuk kelancaran aksi. Mereka juga membahas mengenai tuntutan yang mereka inginkan dan perlengkapan yang diperlukan saat aksi berlangsung seperti tulisan-tulisan yang berisi tuntutan dalam spanduk dan banner. Pembagian tugas dilapangan juga dibahas dalam rapat aliansi. Ketua gerakan membagi tugas untuk anggota aliansi agar mengerti tugas masing-masing dalam dirinya. Anggota aliansi bertugas maju membawa spanduk di depan kantor kecamatan Jabon dan sebagian lagi berjaga-jaga dibelakang sembari mengawasi jalannya aksi. Korlap aksi bertugas memimpin jalannya aksi dan ketua gerakan bertugas melakukan pembicaraan langsung dengan pemerintah kecamatan.

Aksi yang dilakukan gerakan aliansi penyelamat desa ini berlangsung pada Februari 2018. Bentuk perlawanan yang dilakukan aliansi adalah dengan berbondong-bondong mendatangi kantor kecamatan Jabon dengan membawa banner dan spanduk yang berisikan tuntutan mereka. Seperti dalam hasil rapat yang membahas mengenai pembagian tugas. Terdapat empat tuntutan yang diinginkan oleh aliansi yakni pemberhentian tetap kepala desa bukan hanya sementara, adanya penanggung jawab (PJ) tetap agar pemerintahan desa berjalan lebih baik lagi. Selanjutnya, meminta adanya Pilkades 2018 karena ketika PJ tetap ada maka selanjutnya dapat mengadakan pemilihan kepala desa di Desa Dukuhsari. Terakhir, meminta mundurnya ketua BPD dari kursi kepemimpinannya karena dirasa telah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pengawas kinerja kepala desa.

Cukup lama gerakan aliansi penyelamat desa menjalankan aksinya, pihak dari kecamatan memanggil perwakilan aliansi untuk melakukan mediasi. Mediasi ini dihadiri oleh pihak kecamatan Jabon, pemerintah desa, Polsek Jabon, dan ketua gerakan. Segala tuntutan aliansi dibahas dalam mediasi yang dihadiri berbagai pihak tersebut. Aliansi beranggapan bahwa pihak kecamatan berusaha *menjegal* keinginan dari aliansi dengan mempertanyakan dan meminta salinan putusan dari kejaksaan terkait dengan kepala desa agar segala proses dapat dijalankan. Pihak kecamatan meluruskan bahwa yang dilakukan mereka berdasarkan aturan yang berlaku, sehingga tidak dapat memenuhi keinginan aliansi terkait tuntutan mereka. Pemberhentian tetap kepala desa dan adanya PJ tetap tidak dapat dilakukan oleh pihak kecamatan karena merupakan kewenangan bupati. Terkait tuntutan yang lain seperti pilkades 2018 dan pengunduran Ketua BPD, pihak kecamatan dan pemerintah desa tidak dapat memenuhinya karena status hukum kepala desa yang diberhentikan sementara, APBDes Desa Dukuhsari yang tidak mungkin melakukan pencairan dana dan belum adanya rincian keperluan pembiayaan untuk pilkades 2018, serta tidak adanya alasan dan bukti yang menguatkan bahwa ketua BPD harus mengundurkan diri dari kursi kepemimpinannya.

Gerakan aliansi penyelamat desa dalam menjalankan aksinya pasti memiliki sumberdaya untuk melakukan mobilisasi demi terwujudnya aksi didepan kantor kecamatan Jabon. Terdapat empat sumberdaya yang dimiliki oleh aliansi yakni pertama, seorang pemimpin yang mana memiliki peran yang sangat besar untuk menjalankan roda aliansi. Pemimpin aliansi ini dikenal sebagai orang ditakuti dan memiliki pengaruh yang cukup besar di desa. Walaupun dari luar nampak sebagai ketua preman, namun terdapat beberapa warga yang tak sungkan membutuhkan bantuannya. Niatnya yang ingin pemerintahan desa bersih dari korupsi menjadikan beberapa warga mendukung aksi yang dilakukannya. Kedua, keuangan yang mana uang untuk aliansi ini didapatkan melalui iuran anggota yang dilakukan setiap rapat dan bersifat sukarela. Keuangan aliansi tidak hanya didapatkan melalui iuran sukarela, namun juga mendapatkan sumbangan besar dari salah satu anggota yang tergabung dalam media sidoarjo dan adapula yang merupakan calon kepala desa sebelumnya.

Ketiga, pengikut atau pendukung yakni merupakan sumberdaya yang harus dimiliki karena tanpa adanya pendukung tidak dapat menjalankan aliansi. Bert Klandermans membagi mobilisasi pengikut atau pendukung menjadi dua yakni mobilisasi consensus dan mobilisasi aksi

(Klandermans 1984 dalam Klandermans 2005: hal 69 dan hal 105). Mobilisasi consensus berkaitan dengan mendapatkan dukungan dari pendukung potensial. Aliansi memiliki pendukung potensial yang bekerja di media Sidoarjo dan satunya lagi merupakan calon kepala desa tahun 2013. Mobilisasi aksi berkaitan dengan pendukung yang membantu aliansi dari awal hingga akhir dengan mengikuti aksi didepan kantor kecamatan. Terbukti terdapat beberapa warga yang membantu terlaksananya aksi yang dilakukan oleh aliansi penyelamat desa. Walau terhitung sedikit, namun mereka bersedia membantu dari awal hingga akhir. Terakhir, akses media yang merupakan sumberdaya yang dimiliki aliansi. Akses media dibutuhkan untuk menarik simpati dari masyarakat lainnya. Saat aksi berlangsung terdapat beberapa kawan media yang meliput aksi didepan kantor kecamatan Jabon. Hal ini terjadi dikarenakan anggota dari aliansi tergabung dalam media Sidoarjo, sehingga tidak sulit aksi ini dimuat dimedia.

Motif Gerakan Aliansi Penyelamat Desa

Motif berkaitan dengan dorongan terhadap seseorang dalam melakukan sesuatu untuk memenuhi keinginannya. Seperti yang dikatakan Bert Klandermans yakni seseorang akan berpikir rasional yang berarti memikirkan untung dan rugi dalam mengikuti gerakan (Klandermans dalam Sukmana 2016 : hal 155). Motif ini diawali dari motif setiap individu kemudian berubah menjadi motif kelompok. Motif individu terindikasi lebih mengarah pada motif ekonomi dan motif mengganti kekuasaan. Ketua gerakan yang bekerja serabutan dan tidak memiliki penghasilan tetap ini, akhirnya membuat aliansi penyelamat desa. Ditambah kebanyakan dari warga yang mengikuti gerakan merupakan warga yang tidak bekerja atau pengangguran, sehingga ketika adanya uang yang dijanjikan mereka langsung mengikuti aksi didepan kantor kecamatan Jabon.

Motif mengganti kekuasaan ini berkaitan dengan warga yang hendak maju pada pilkades 2018. Warga yang menginginkan adanya penggantian kekuasaan ini dulunya merupakan calon kepala desa yang gagal pada tahun 2013 dan satunya lagi merupakan anak dari kepala desa periode sebelumnya. Mereka tergabung dalam aliansi agar mereka dapat mewujudkan keinginan mereka. Korlap aksi aliansi penyelamat desa ini merupakan warga yang akan maju pada pilkades 2018, sehingga tidak masalah bagi dirinya untuk mengeluarkan uang untuk kelangsungan aliansi. Begitu pula dengan calon kepala desa yang gagal tahun 2013, beliau juga menggelontorkan dana untuk berjalannya aksi didepan kecamatan Jabon.

Motif tersembunyi setiap individu ini akhirnya memunculkan motif kelompok. Dikarenakan dalam rapat aliansi segala ide-ide maupun masukan dari individu dibahas dengan matang, dan tersalurkan dalam tuntutan yang diajukan saat aksi berlangsung didepan kecamatan Jabon. Kecondongan yang terlihat dalam motif kelompok ini lebih mengarah pada mengganti kekuasaan. Terlihat dalam tuntutan yang diinginkan, semua tertuju pada penggantian kekuasaan. Seperti pemberhentian tetap kepala desa, PJ tetap, dan Pilkades 2018. Ketika kepala desa diberhentikan secara tetap maka akan hadir PJ tetap, dan ketika PJ tetap telah ada selanjutnya dapat mengadakan Pilkades 2018.

Kesimpulan

Kekecewaan yang dirasakan oleh warga Desa Dukuhsari melahirkan Gerakan Aliansi Penyelamat Desa yang dipimpin oleh salah satu warga Asli Desa Dukuhsari. Untuk menjalankan aksinya, Aliansi menggunakan strategi dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki untuk melakukan mobilisasi. Sumberdaya ini berupa pemimpin, pengikut/pendukung, keuangan, dan akses terhadap media. Strategi lainnya dengan melakukan rapat secara rutin membahas ide-ide, masukan dan keinginan yang hendak dicapai dalam aksi. Membagi tugas dengan anggota untuk melakukan aksi didepan kantor Kecamatan Jabon dengan membawa banner dan spanduk menyuarakan empat tuntutan yakni pemberhentian tetap kepala desa, PJ tetap, Pilkades 2018, dan mendesak ketua BPD mundur dari kursi kepemimpinan. Diketahui bahwa terdapat motif individu dalam aliansi yakni motif ekonomi untuk mendapat keuntungan berupa uang dan motif mengganti kekuasaan untuk mendapat jabatan dalam struktur pemerintah desa Dukuhsari. Motif kelompok didapatkan dari ide-ide dan masukan dari setiap individu yang tersalurkan dalam tuntutan yang diajukan aliansi penyelamat desa kepada pemerintah kecamatan. Hasil dari tuntutan aliansi tidak dapat diwujudkan karena harus melalui beberapa prosedur aturan yang berlaku sehingga tidak dapat dilakukan. Walau begitu aksi ini dapat dikatakan berhasil karena kepala desa tidak lagi duduk dikursi kepemimpinannya dan aliansi mendapatkan keuntungan uang dari aksi yang telah dilakukan.

Daftar Pustaka

- Cahyo R.A, Eko. 2015. *GERAKAN ANTI PEMBAKARAN TIMAH (Studi Kasus Gerakan Sosial pada Masyarakat Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan dalam Menolak Aktivitas Pembakaran Timah)*. Jurnal Mahasiswa Sosiologi Vol 2No 1 : Universitas Brawijaya
- Darmastuti, Rini. 2015. *Gerakan Sosial Tanpa Kekerasan (Gerakan Sosial Masyarakat Samin Terhadap Rencana Pembangunan Pabrik Semen d Sukolilo, Pati)*. Jurnal Humaniora Yayasan Bina Darma Vol. II No. 3
- Hudaya dan Nugroho. 2013. *Kearifan Lokal Vudaya Jawa Sebagai Basis Model Kepemimpinan Yang Efektif*. Univeristas Soedirman
- Mahrid, Rubyanti Alwiyah. 2017. *Strategi Gerakan Pembangunan Hotel “The Rayja” di Kota Batu*. Jurnal Politik Muda Vol. 6 No.3 : Universitas Airlangga
- Prasisko, Yongky Gigih. 2016. *gerakan sosial baru Indonesia: Reformasi 1998 dan Proses Demokratisasi Indonesia*. Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol.3 No.2 : Universitas Gajah Mada
- Sari, Dewi Krina. 2017. *Strategi Mobilisasi Gerakan Masyarakat Dalam Penutupan Industri Pengelolaan Limbah B3 Di Desa Lakardowo Kabupaten Mojokerto*. Jurnal Politik Indonesia, Vol.2 No.1: UNAIR
- Vali, Tri Anggara. 2017. *Gerakan Forum Bali Tolak Reklamasi Dalam Penolakan Reklamasi Teluk Benoa Nusa Dua, Bali*. Universitas Airlangga
- Klandermans, Bert. 2005. *Protes Dalam Kajian Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Terjemahan)
- Sukmana, Oman. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing
- Faktualnews.co. 2018. *Tolak Kades Mantan Napi, Warga Dukuhsari Sidoarjo Ancam Segel Balai Desa*. Diakses dari <https://faktualnews.co/2018/02/08/tolak-kades-mantan-napi-warga-dukuhsari-sidoarjo-ancam-segel-balai-desa/64176/> . diakses pada tanggal 18 Mei 2018
- Kementrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia. 2018. Diakss dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Agraria_dan_Tata_Ruang_Republik_Indonesia Diakses tanggal 1 november 2018
- Liputan 6.com. 2009. *Tolak Kades Mantan Napi, Warga segel balai desa*. diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/238453/tolak-kades-mantan-napi-warga-segel-balai-desa> . Diakses pada tanggal 18 Mei 2018
- Media Madura. 2017. *Ogah Dipimpin Kades Mantan Napi Narkoba, Raturan warga Luruk Kantor Kecamatan*. Diakses dari <https://mediamadura.com/2017/01/06/ogah-dipimpin-kades-mantan-napi-narkoba-raturan-warga-luruk-kantor-kecamatan/> . diakses pada tanggal 18 Mei 2018

Surabaya, Pagi. 2011. *Warga Tolak Kades Mantan Napi*. Diakses dari http://www.surabayapagi.com/read/70280/2011/09/09/Warga_Tolak_Kades_Mantan_Napi.htm. Diakses pada tanggal 18 Mei 2018